



## GEBRAKAN PERTAMA HARYADI-HEROE Kebijakan Transaksi Nontunai Dipercepat

YOGYA (KR) - Kebijakan penerapan transaksi nontunai untuk setiap pengeluaran keuangan daerah di Kota Yogya bakal dipercepat. Kendati berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ, kebijakan itu dianjurkan mulai 1 Januari 2018, namun Pemkot memilih untuk merealisasikan bulan ini.

Keputusan tersebut menjadi gebrakan pertama kepemimpinan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi sejak dilantik 22 Mei 2017 lalu. "Jumat (2/6) kemarin kami sudah menggelar rapat dinas yang dihadiri seluruh kepala instansi hingga camat. Ada komitmen untuk segera menjalankan transaksi nontunai," tandas Walikota Yogya, Haryadi Suyuti, Minggu (4/6).

Haryadi menilai, kendati kebijakan itu merupakan hal yang baru di lingkungan Pemkot Yogya, namun ia optimis aparaturnya tidak membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian. Palsanya, hampir semua pegawai sudah familiar dengan sistem transfer atau pemindahan dana se-

cara elektronik.

Justru, melalui sistem transaksi nontunai, semua pengeluaran akan tercatat dengan baik. Di samping itu, prosesnya juga berlangsung sangat cepat. "Ini sudah menjadi kebutuhan agar transparansi dalam penggunaan dana benar-benar terwujud," imbuhnya.

Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi, menambahkan jika selama ini di tiap instansi harus menyiapkan uang tunai di brankas untuk keperluan kegiatan, ke depan hal itu akan dihilangkan. Semua bentuk pengeluaran untuk pihak ketiga, wajib dilakukan melalui sistem transfer atau nontunai. Nominalnya juga harus sesuai dengan pagu anggaran yang sudah direncanakan. Dengan begitu, celah untuk korupsi serta kolusi akan semakin tertutup.

"Dalam rapat dinas kemarin, kami turut melibatkan Bank BPD DIY karena sebagian besar dana Pemkot tersimpan di sana. Bank BPD DIY sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra dan mensuk-

seskan seluruh transaksi nontunai ini," jelas Heroe.

Oleh karena itu, mulai bulan ini hingga November, Haryadi-Heroe akan memonitor penerapan transaksi nontunai di setiap instansi, baik di tingkatan dinas maupun kecamatan. Bagi instansi yang mampu menerapkan secara utuh dan sesuai prosedur berikut pelaporannya, maka sejumlah apresiasi akan diberikan sebagai dorongan bagi instansi lain.

Heroe menjelaskan, pihaknya akan dibantu oleh Inspektorat dalam menilai kinerja keuangan tersebut. Sehingga tidak perlu dibentuk tim khusus guna mendorong percepatan penerapan transaksi nontunai dalam setiap pengeluaran keuangan Pemkot.

"Sebenarnya Bagian Pengendalian Pembangunan sejak tahun lalu sudah menerapkan transaksi nontunai untuk pembayaran honorarium pegawai. Hasilnya cukup efektif, namun harus diimplementasikan juga untuk jenis pengeluaran lainnya," terangnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005